

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan meraih kemerdekaan tidak terlepas dari pengorbanan harta, benda bahkan nyawa manusia. Namun, setelah kemerdekaan tercapai, Indonesia tidak berarti lepas dari perjuangan. Bangsa Indonesia berada dalam keadaan tidak menentu, baik secara fisik maupun psikis untuk mencari atau menempatkan diri pada situasi negara yang mandiri, lepas dari tangan Negara asing.¹ Sebagai negara yang baru merdeka, bangsa Indonesia tidak sedikit menghadapi berbagai persoalan yang terus bermunculan baik yang bersifat *ekstern* maupun *intern*. Optimisme cita-cita akan perubahan nasib bangsa setelah lepas dari penjajahan ternyata masih ada. Masalah ataupun persoalan yang ada merupakan warisan zaman penjajahan. Pasca kemerdekaan, para pemimpin yang kurang berpengalaman hanya mementingkan kepentingan pribadinya, sehingga banyak terjadi penyelewengan dalam birokrasi pemerintahan yang semua itu menambah jumlah persoalan-persoalan yang ada.²

¹ R.Z. Leirissa, *PRRI/Permesta Membangun Indonesia Tanpa Komunis* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991) p. 7

² Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan Ke Integrasi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005) p. 1

Periode sejarah tahun 1949-1959 ditandai dengan banyaknya kemelut yang terjadi di dalam negeri. Adanya berbagai percobaan perlawanan terhadap pemerintahan pusat selalu dapat diatasi dengan kekuatan militer. Salah satunya pada tahun 1958 sampai 1961 terjadi pemberontakan daerah terhadap pemerintahan pusat yang digerakan oleh tokoh politik di daerah Sumatra.³ Sumatra dalam beberapa hal berbeda dari masyarakat lain di luar pulau Jawa. Meskipun luas daerah dan jumlah penduduknya relatif sedikit, namun orang Sumatra khususnya Sumatra Barat memainkan peranan yang cukup penting dalam perpolitikan Indonesia.⁴ Kedudukan para pemimpin Minangkabau di masa pergerakan nasional dan dalam pemerintahan NKRI hanya kalah dari pemimpin dari Jawa yang merupakan 60% dari penduduk Indonesia. Kedua suku ini mewakili dua konsep yang bertolak belakang tentang pemerintahan negara untuk bersaing dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca- kemerdekaan, tetapi dalam persaingan tersebut kesatuan hirarki Jawa yang selalu menang.⁵

Keyakinan tradisional Jawa tentang kemakmuran negara tergantung pada kekuatan penguasa, sedangkan dalam pandangan tradisional Minangkabau kemakmuran negara justru tergantung pada keserasian dan kesesuaian antara unsur-unsur

³ Idris Soewardi, *Perjalanan Dalam Kelam; Sinarai Kisah Pemberontakan PRRI* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2008) p. 71.

⁴ Kurang dari dua juta jiwa dibanding sekitar enam puluh juta jumlah penduduk Hindia Belanda pada tahun 1939.

⁵ Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan.....* p. 3

negara, yang merupakan kesatuan tertinggi dari rakyat yang diakui oleh adat Minangkabau. Suatu bentuk konsep pemikiran pemerintahan yang amat berbeda dari pandangan orang Jawa pada umumnya.⁶ Sumatra Barat pada dasarnya menghendaki suatu pemerintahan yang *otonom*.⁷ Di awal tahun 1950-an, partai politik menganut prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Pada waktu itu pembagian kekuasaan di pusat dan daerah tentang isu personil militer dan keuangan serta perkembangan PKI, merupakan persoalan yang menjadi sumber pertengkaran. Rakyat sadar bahwa revolusi yang baru saja selesai telah berhasil sebagian karena diatur, baik secara finansial maupun secara militer terutama dengan basis lembaga-lembaga yang terpisah dan berakar di daerah.⁸

Pada tanggal 15 Februari 1958 rakyat Sumatra Barat membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan PRRI sebagai pemerintahan tandingan, dengan menegaskan bahwa mereka terbebas dari kewajiban dan taat kepada Sukarno selaku kepala negara saat itu. Perlawanan rakyat Sumatra ini kemudian dikenal dengan Pemberontakan PRRI. Ahmad Husein adalah pejuang kemerdekaan Indonesia serta dikenal sebagai pendiri

⁶ Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan*..... p. 4

⁷ Dalam pengertian ini, pihak daerah diberi hak penuh untuk mengatur hal-hal yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Sedang hal-hal yang menyangkut kepentingan nasional seperti keamanan, politik luar negeri, dan industrialisasi menjadi bagian pemerintah pusat Lihat R.Z. Leirissa, p. 9

⁸ Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan*..... p. 225

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Padang, Sumatra Barat, pada 1958. Pada tanggal 15 Februari, Ahmad Husein mendeklarasikan pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Padang, Sumatra Barat. Adapun faktor yang melatarbelakangi adalah kecemburuan pemerintah daerah terhadap program pembangunan yang dilakukan di Jakarta. Ahmad Husein menganggap pemerintahan Soekarno telah mengabaikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tindakan pemberontakan PRRI lantas memicu berbagai aksi militer dari pemerintah pusat di Jakarta, yang kemudian menimbulkan perang saudara di Sumatra Barat.

Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) adalah sebuah pemerintahan baru berupa gerakan pertentangan di Sumatra pada 1950. PRRI diprakarsai oleh beberapa tokoh seperti: Letnan Kolonel Ahmad Husein, Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Mr. Assaat Dt. Mudo, Maludin Simbolon, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikoesoemo, Moh. Sjafei, J.F. Warouw, Saladin Sarumpaet, Muchtar Lintang, Saleh Lahade, Ayah Gani Usman, dan Dahlan Djambek. Setelah pembentukan Dewan Banteng⁹ pada tanggal 20 Desember 1956, Letkol Ahmad Husein kemudian merebut kekuasaan Pemerintah Daerah dari Gubernur Ruslan Muljohardjo. Dengan dalih gubernur yang

⁹ Dewan Banteng adalah suatu dewan yang dibentuk oleh beberapa orang tokoh militer mantan pimpinan dan anggota Komando Divisi IX Banteng yang telah dibubarkan beserta tokoh sipil yang berasal dari Sumatra Tengah

ditunjuk pemerintah tidak berhasil menjalankan pembangunan daerah, Letkol Ahmad Husein kemudian mencetuskan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada 15 Februari 1958. PRRI kemudian mengajukan tiga tuntutan kepada pemerintah pusat, yaitu: dibubarkannya kabinet Djuanda, Mohammad Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX membentuk pemerintahan sementara sampai pemilihan umum berikutnya akan dilaksanakan Soekarno kembali pada posisi konstitusionalnya. Tuntutan lain yang juga diajukan oleh PRRI juga terkait dengan masalah otonomi daerah karena pemerintah pusat dianggap tidak adil kepada para warga sipil dan militer soal pemerataan dana pembangunan. Pemerintah menganggap pemberontakan PRRI harus segera dituntaskan dengan melakukan operasi gabungan yang terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara Angkatan Perang RI (APRI). Tentara APRI melayangkan berbagai macam tindak kekerasan, bahkan ribuan orang juga ditangkap dengan cara paksa karena dicurigai sebagai simpatisan PRRI.

Dalam penelitian yang berjudul “Peranan Ahmad Husein Dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)” dipandang oleh peneliti menarik untuk dikaji. Peneliti sendiri tertarik untuk menelusuri sejarah Indonesia pasca kemerdekaan khususnya di Sumatra Barat, karena faktor yang melatarbelakangi terjadinya pemberontakan PRRI adalah kecemburuan pemerintah daerah-daerah di Indonesia terhadap

program pembangunan yang dilakukan di Jakarta, atau tidak meratanya pembangunan yang dilakukan presiden Soekarno. Ahmad Husein menganggap pemerintahan Soekarno telah mengabaikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah selain Jakarta. Tindakan pemberontakan PRRI lantas memicu berbagai aksi militer dari pemerintah pusat di Jakarta, yang kemudian menimbulkan perang saudara di Sumatra Barat.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana biografi Ahmad Husein?
2. Bagaimana latar belakang berdirinya PRRI di Sumatra Barat?
3. Bagaimana kiprah Ahmad Husein dalam peristiwa PRRI?

C. Tujuan Penelitian

Ketiga permasalahan di atas setelah dikaji dan ditelaah dalam penelitian ini, mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui biografi Ahmad Husein.
2. Mengetahui latar belakang berdirinya PRRI di Sumatra Barat.
3. Mengetahui Kiprah Ahmad Husein dalam peristiwa PRRI.

D. Tinjauan Pustaka

Sebagai peristiwa yang penting, PRRI banyak dijadikan objek penelitian oleh sejumlah besar pengamat sosial-kemasyarakatan terutama mahasiswa. Oleh sebab itu, sampai sekarang sudah banyak buku, artikel, biografi, autobiografi, dan karya ilmiah lainnya yang membahas peristiwa PRRI. Namun belum ada yang membahas secara fokus mengenai peran Ahmad Huesin dalam peristiwa pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Peneliti menjadikan skripsi dengan judul *Pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia Di Sumatera Selatan Tahun 1956-1961* karya Diki Tri Apriansyah Putra, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya Tahun 2020, sebagai tinjauan pustaka dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga menjadikan buku-buku, jurnal dan artikel untuk dijadikan sumber dalam penulisan skripsi, diantaranya:

1. Buku yang berjudul “*Perlawanan seorang Pejuang*” Biografi Kolonel Ahmad Husein, disusun dan ditulis oleh Mustika Zed dan Hasril Chaniago. Terbit tahun 2014 oleh Pustaka Sinar Harapan, berisi tentang perjalanan seorang pelaku sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia di Sumatra Barat beliau juga dikenal dengan sosok yang dikatakan sebagai pimpinan pemberontakan PRRI yaitu Kolonel Ahmad Husein. Dalam buku ini terdapat beberapa kumpulan kliping dari media massa dan transkrip wawancara serta media elektronik maupun dokumen-

dokumen penting tentang Pemberontakan PRRI. Buku ini digunakan untuk mengetahui kesaksian dari pengalaman tokoh-tokoh PRRI dalam melakukan pemberontakan.

2. Buku yang berjudul “*PRRI Pemberontakan atau bukan?*” ditulis oleh Syamdani dan terbit tahun 2009 oleh Media Pressindo Yogyakarta. Buku ini mengulas tentang pengkajian kembali alasan serta motif di balik kemunculan Pemerintah Refolusioner Republik Indonesia (PRRI).
3. Buku yang berjudul “*Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*” terbit tahun 2005 yang disusun oleh MC. Ricklefs. Buku ini menguraikan tentang sejarah Indonesia dengan perubahan-perubahan yang terjadi di segala bidang dari pengaruh kedatangan Islam di tanah air sampai perkembangan sejarah Indonesia masa reformasi.
4. Buku yang berjudul “*Keterlibatan Australia dalam Pemberontakan PRRI/Permesta*” yang ditulis oleh Hadi Subandio, terbit tahun 2002 oleh PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta. Buku ini berisi tentang keterlibatan Australia dan Amerika Serikat serta sekutunya dalam Pemberontakan PRRI. Buku ini digunakan untuk menjawab permasalahan kedua, yaitu tentang perjalanan Pemberontakan PRRI di Sumatra Barat yang dalam pemberontakan itu ada keterlibatan pihak asing.
5. Buku dengan judul “*PRRI/Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*” buku ini ditulis oleh R.Z

Leirissa pada tahun 1991 dan diterbitkan oleh Pustaka Utama Grafiti Jakarta. Buku ini mengulas tentang latar belakang munculnya Pemberontakan PRRI yang dapat dilihat dari berbagai factor baik politik, ekonomi maupun militer bahkan sampai pengaruh perkembangan partai komunis. Dalam buku ini penulis mencoba menampilkan pandangan dan gagasan para eksponen PRRI yang diawali munculnya dewan-dewan daerah. Buku ini digunakan untuk mengetahui latar belakang pemberontakan itu terjadi dan digunakan untuk menjawab permasalahan pertama.

Kemudian penulis menggunakan jurnal karya Saafroedin Bahar, dengan judul *PRRI-Permesta: Sebuah Kasus Keterkaitan Antara Masalah Integrasi Nasional Dan Perang Dingin* yang diterbitkan oleh Universitas Indonesia: Jurnal Studi Amerika, Vol. IV, tahun 1999, sebagai salah satu sumber penulisan.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian yang berjudul “*Peranan Ahmad Husein dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)*” merupakan salah satu studi kasus sejarah nasional. Peneliti menggunakan teori konflik guna mengkaji “*Peranan Ahmad*

Husein dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) ” diperlukan suatu konsep persoalan peranannya sendiri.

Peranan berarti aspek dinamis; kedudukan; status. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Didalam peranan biasanya terdapat fasilitas untuk individu menjalani peranannya.¹⁰ Seperti halnya Ahmad Husein yang memiliki peranan dalam menggerakkan masyarakat Sumatera Barat untuk mendirikan pemerintahan tandingan yaitu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia.

Ahmad Husein adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan pemimpin militer PRRI. Pada tanggal 15 Februari 1958 di Padang Ahmad Husein membentuk Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di bawah pimpinan Syafruddin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri dengan tujuan mengoreksi pemerintahan otoriter Soekarno yang dianggap inkonstitusional dan mengabaikan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Tindakan koreksinya itu ternyata mendapat sambutan berupa aksi militer dari pemerintah pusat di Jakarta sehingga menimbulkan perang saudara di Sumatra Barat.¹¹

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (disingkat dengan PRRI) merupakan gerakan oposisi

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2012) p. 212

¹¹ Mestika Zed, *Perlawanan Seorang Pejuang* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2014) p. 5

pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat yang melahirkan pemerintah tandingan pada 15 Februari 1958. Gerakan ini didahului oleh keluarnya ultimatum Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara dari Dewan Perjuangan yang dipimpin oleh Ahmad Husein di Padang, Sumatra Barat, Indonesia. PRRI berawal dari tuntutan tokoh militer dan sipil Sumatra Tengah mengenai otonomi daerah dan desentralisasi. Ahmad Husein mendeklarasikan PRRI pada 15 Februari 1958 setelah merasa pemerintah tidak proaktif menanggapi tuntutan tersebut. Pemerintah pusat melihat PRRI sebagai sebuah gerakan separatisme dan menumpasnya dengan pengerahan kekuatan militer terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah militer Indonesia. PRRI yang tidak bersiap untuk perang terpaksa menghadapi operasi militer tersebut.¹²

Revolusioner sendiri berarti cenderung menghendaki perubahan secara menyeluruh dan mendasar.¹³ Revolusioner adalah orang yang berpartisipasi atau mendukung revolusi. Selain itu, ketika digunakan sebagai kata sifat, istilah revolusioner merujuk pada sesuatu yang memiliki pengaruh besar dan tiba-tiba pada masyarakat, atau pada suatu aspek dalam usaha manusia. Peristiwa revolusi yang dilakukan oleh PRRI lebih sering disebut sebagai pemberontakan.

¹² Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang Dan Zaman Republik Indonesia* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2019) p. 375

¹³ KBBI DARING, diakses dari <https://KBBI.web.id> pada 16 Januari 2023 pukul 19.51 WIB

Pemberontakan adalah penolakan terhadap otoritas. Pemberontakan dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari pembangkangan sipil (civil disobedience) hingga kekerasan terorganisir yang berupaya meruntuhkan otoritas yang ada. *Karl Marx* berpendapat bahwa pemberontakan itu muncul tidak hanya disebabkan oleh sekelompok orang yang merasa tertekan secara ekonomi maupun politik dari penguasa. Namun, karena frustrasi atas kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, maka segenap kelompok sosial bergabung karena merasa senasib sepenanggungan untuk bersama-sama atau berevolusi yang tindakan ini timbul secara spontan atau tidak merupakan persekongkolan terlebih dahulu yang ditujukan kepada pemerintahan atau penguasa.¹⁴ Maka revolusi atau pemberontakan itu terjadi berawal dari ketidakpuasan dan kekecewaan serta hilangnya kepercayaan yang dialami oleh manusia dalam suatu kekuasaan atau kepemimpinan dalam sistem politik suatu negara. Masa kepemimpinan Sukarno dengan demokrasi terpimpin mengacu pada sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik menyebabkan krisis di segala bidang yang dialami daerah-daerah khususnya di luar pulau Jawa.

Pada tahun 1958 krisis ini memuncak dengan ditandai munculnya Pemberontakan PRRI di Sumatra Barat hingga tahun 1961. Lahirnya PRRI berkaitan dengan hilangnya

¹⁴ *Teori Konflik Karl Max Dalam Permasalahan Sosial*, di akses dari <http://www.ruangguru.com> pada 10/12/2022 pukul 01.12 WIB

kepercayaan daerah di luar pulau Jawa terhadap kebijaksanaan pusat atau Jakarta. Rasa tidak puas karena merasa diperlakukan tidak adil, berkembang pada pertengahan tahun 1950-an. Berkembangnya gerakan PRRI di Sumatra yang kemudian berpusat di Sumatra Barat tepatnya di Padang Bukittinggi, berlanjut menjadi pemberontakan. Lahirnya Pemberontakan PRRI adalah salah satu dari berbagai pertentangan yang saling berhubungan dan dilatarbelakangi secara umum yaitu adanya kekecewaan terhadap kepemimpinan Sukarno yang bersifat otoriter. Kekecewaan itu didasarkan atas ketidaksenangan terhadap struktur pemerintahan saat itu yaitu sistem pemerintahan dengan kinerja birokrasi yang tidak efisien dan korup. Masyarakat Sumatra Barat menganggap kemerdekaan yang sudah dicapai tidak mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat secara umum. Kabinet yang dibentuk tidak berumur panjang, karena tidak dapat mengatasi permasalahan yang hanya mementingkan kepentingan partainya serta diri sendiri.

Adanya kesenjangan sosial yang mencolok pusat dan daerah antara Jawa dan di luar Jawa dilihat dari bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya. Suatu penilaian atas perbedaan-perbedaan ini menyebabkan ketegangan antara daerah-daerah diluar pulau Jawa dengan pemerintahan pusat di Jakarta. Munculnya kelompok yang mengatasnamakan PRRI yang pada dasarnya tidak ingin melepaskan diri dari pemerintahan Indonesia, tetapi hanya merupakan aksi protes

terhadap perkembangan politik pemerintah pusat dengan kebijakan-kebijakan yang diambil. Mereka yang tidak puas dengan perkembangan politik dalam negeri berbuntut pada perubahan ekonomi yang pincang antara pusat dan daerah luar Jawa khususnya di Sumatra Barat. Hal itu, mendorong untuk mengadakan konflik dengan pemerintah pusat melalui kekerasan yaitu pemberontakan, yang sebelumnya tuntutan dari daerah ke pemerintah pusat tidak pernah ditanggapi. Dengan cara inilah diharapkan daerah Sumatra Barat dan wilayah luar Jawa pada umumnya mendapatkan perlakuan yang adil disegala bidang khususnya perbedaan perekonomian yang semakin mencolok antara Jawa dan luar Jawa melalui tuntutan-tuntutan salah satunya otonomi seluas-luasnya untuk daerah di luar Jawa.

F. Metode Penelitian

Sebagai suatu disiplin ilmu, sejarah harus memenuhi syarat yang berlaku bagi ilmu pada umumnya yaitu bersifat kritis, metodis, obyektif, dan sistematis. Obyek kajian sejarah adalah fakta, peristiwa dan rekontruksi yang dikemas dalam ekplanasi historis tanpa meninggalkan urutan waktu. Fakta sejarah yang tanpa disertai kronologi, maka uraian hanya akan berbentuk dongeng atau legenda.¹⁵ Setelah rekontruksi sejarah dilakukan dalam bentuk ekplanasi, tahap selanjutnya adalah memberikan penjelasan kepada pembaca. Rekontruksi yang

¹⁵ G. Moejanto, *Ilmu Sejarah dan Masa Depan: Basis Bulan September*, seri XLII, No.9, Yogyakarta, 1994, p. 325

dilakukan sebenarnya berusaha memberikan keterangan kepada suatu kelampauan yang peneliti hadirkan kembali, dan kelampauan itu adalah suatu kepastian yang tidak terhindarkan.

Pada tahap penerangan bagi pembaca yang mana rekontruksi itu berhadapan dengan pemahaman empiris terhadap setiap gejala yang ada. Maka perlu bagi sejarawan untuk menjelaskan elemen-elemen yang jelas tentang peristiwa masa lampau dengan menyertakan teori sejarawan.¹⁶ Ekplanasi dalam sejarah adalah penemuan, pemahaman, dan analisis dari ratusan ikatan yang mengikat sejumlah besar permukaan pernyataan kemanusiaan antara satu dengan yang lain, sehingga ikatan itu adalah fenomena historis untuk menjadi kesatuan yang mudah untuk dimengerti.¹⁷

Pendekatan sosiologis dipilih untuk memberikan gambaran kehidupan sosial masyarakat Sumatra Barat selama bernaung di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Suatu indikator yang dapat dilihat bagaimana kehidupan sosial rakyat di luar Jawa pada umumnya dan Sumatra Barat khususnya. Selama sepuluh tahun lebih bangsa Indonesia sudah merdeka, tetapi pada kenyataannya masyarakat Sumatra Barat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Anggapan bahwa keadaan bangsa Indonesia khususnya Sumatra Barat tidak semakin baik disebabkan oleh

¹⁶ Wayan Tegel Eddy, *Masalah Ekplanasi Dalam Disiplin Ilmu Sejarah*, seri XL, Basis No.11, Yogyakarta, p. 430

¹⁷ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT Garamedia, 1993) p.16

kepemimpinan Sukarno. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya tindak kejahatan yang tidak terkendali, pengangguran serta keamanan rakyat yang kurang terjamin oleh negara. Untuk memperoleh eksplanasi yang jelas secara historis, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pemilihan Topik

Penelitian ini berjudul “Peranan Ahmad Husein Dalam PRRI di Sumatra Barat Tahun 1958-1961”. Secara garis besar penelitian ini ingin mengetahui latar belakang muncul dan berkembangnya Pemberontakan PRRI di Sumatra Barat. PRRI singkatan dari Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. PRRI diproklamasikan pada tanggal 15 Februari 1958 merupakan suatu pemerintah tandingan yang bertujuan untuk melawan pemerintah pusat. PRRI dibentuk di Sumatra Barat dengan Perdana Menteri Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan Sukarno. Pemberontakan ini muncul atas dasar kekecewaan rakyat Sumatra terhadap pemerintahan pusat pada masa demokrasi terpimpin yang menerapkan sistem sentralistik. Keberhasilan atas penumpasan Pemberontakan PRRI menjadikan tentara tidak mendapat simpati dari masyarakat, karena penanganan pemerintah yang keras dibawah undang-undang darurat perang mengakibatkan tentara mendapat banyak kecaman.

b. Pengumpulan Sumber (heuristik)

Dalam penelitian ini pengumpulan sumber dilakukan dengan membaca buku-buku hasil tulisan dari para tokoh Pemberontakan PRRI maupun dari tulisan orang lain selaku saksi mata dalam peristiwa PRRI. Selain itu penelaahan dari dokumen-dokumen dilakukan dengan mempelajari arsip arsip yang berkaitan dengan Arsip Nasional yang banyak menampilkan bukti-bukti dari peristiwa PRRI di Sumatra Barat. Dalam penelitian ini penulis lebih banyak menggunakan sumber sekunder yang diambil melalui studi pustaka. Sumber-sumber tersebut diperoleh dari perpustakaan daerah provinsi Banten, serta buku-buku lain yang didapat dari toko-toko buku dan didapat secara online melalui google books. Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan sumber, karena pelaku dalam peristiwa ini kebanyakan sudah meninggal, sehingga penulis menggunakan sumber dari buku-buku yang ditulis ataupun dari internet dengan menyertakan kutipan sesuai pedoman penulisan skripsi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

c. Kritik Sumber

Kritik sumber merupakan tahap dalam penelitian sejarah setelah proses pengumpulan data. Kritik ini dilakukan untuk mengetahui otentik atau tidaknya suatu sumber atau otentisitas (*kritik ekstern*) dan kredibel atau tidaknya suatu sumber atau kredibilitas (*kritik intern*).¹⁸ Otentisitas artinya keaslian sumber, sedangkan kredibilitas artinya tingkat kepercayaan sumber untuk dapat dipercaya atau tidak sumber yang digunakan. Dalam penelitian ini, kritik intern lebih diperlukan daripada kritik ekstern. Kritik intern lebih diperlukan karena kebenaran sumber atau data masih perlu lagi dikaji apakah sumber atau data yang digunakan tersebut dapat dipercaya atau tidak kebenarannya. Peneliti melakukan perbandingan dari berbagai sumber yang berhasil didapat dan mencari kesesuaian dari sumber-sumber yang ada.

Dengan membandingkan antara sumber satu dengan yang lainnya, maka akan diketahui keabsahan sumber-sumber yang ada tersebut. Untuk itu, perlu membandingkan sumber-sumber yang ada, yaitu antara sumber yang satu dengan sumber lainnya. Sebagai contoh membandingkan buku Syamdani berjudul “*PRRI Pemberontakan Atau Bukan*” hlm. 35-55, dengan buku R.Z. Leirissa yang berjudul “*PRRI/Permesta Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*”, hlm.1-9, kemudian buku Soewardi Idris

¹⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2001) p. 101-102

yang berjudul “*Perjalanan Dalam Kelam*”; sinairai kisah pemberontakan PRRI, hlm.169-185. Selain itu buku karangan Audrey Kahin dengan judul “*Dari Pemberontakan ke Integrasi*”, hlm.251-254. Di dalam keempat buku tersebut, terdapat uraian yang semuanya mempunyai pendapat yang hampir sama dan senada mengenai alasan atau latar belakang munculnya Pemberontakan PRRI di Sumatra Barat. Konflik antara pusat dan daerah khususnya dalam bidang ekonomi merupakan alasan utama munculnya pemberontakan. Meskipun demikian, masing-masing dari tulisan-tulisan tersebut mempunyai cara penjelasan yang berbeda-beda. Dengan membandingkan antara sumber satu dengan yang lainnya, maka akan diketahui keabsahan sumber-sumber yang ada.

d. Interpretasi

Tahap ketiga ini merupakan tahap penafsiran terhadap sumber-sumber yang digunakan, kemudian dilakukan suatu uraian yang disertai dengan analisa-analisa. Interpretasi sering disebut biang subyektifitas. Untuk itulah subyektifitas dalam penulisan sejarah diakui tetapi sebesar mungkin untuk dihindari. Interpretasi ada dua macam yaitu

analisis dan sintesis. Analisis yang berarti menguraikan sedang sintesis berarti menyatukan. Analisa sumber merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, karena dalam interpretasi ini terdapat unsur penafsiran terhadap sumber yang sudah dinilai keabsahannya. Hasil analisa akan menunjukkan tingkat keberhasilan suatu penelitian, karena sejarah sebagai ilmu pengetahuan memandang setiap peristiwa dalam hukum kausalitas selalu berusaha menemukan sebab suatu peristiwa yang kemudian akan memunculkan suatu akibat dari peristiwa yang telah terjadi. Dalam proses interpretasi sejarah, peneliti harus berusaha mencapai pengertian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa. Interpretasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan data guna mengetahui peristiwa-peristiwa yang mana yang terjadi dalam waktu yang bersamaan. Jadi, untuk mengetahui sebab-sebab dalam peristiwa sejarah memerlukan pengetahuan tentang masa sebelumnya atau peristiwa masa lalu, sehingga pada saat penelitian akan diketahui situasi secara umum baik itu pelaku, tindakan yang diambil dan tempat kejadian.¹⁹

e. Historiografi

¹⁹ Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ar-Rus Media, 2007) p. 74

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari penelitian sejarah, yaitu tahap penulisan sejarah atau historiografi. Penulisan sejarah tidak terlepas dari sumber-sumber yang terkait di dalamnya, untuk memberikan gambaran mengenai rangkaian suatu peristiwa dalam penelitian sejarah. Dalam penulisan sejarah, aspek kronologis suatu peristiwa sangat penting, sehingga akan lebih mudah mengetahui kapan peristiwa tersebut sebenarnya terjadi. Karena itulah, alur pemaparan data harus selalu diurutkan secara kronologis, agar nantinya pembaca dapat dengan mudah memahami.²⁰

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang akan menjelaskan permasalahan-permasalahan pokok. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan penjelasan tentang Biografi Ahmad Husein, terdiri dari Riwayat Hidup Ahmad Husein, Riwayat Pendidikan Ahmad Husein, dan Rentang Karir Ahmad Husein.

²⁰ Helius Syamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2007) p. 77

Bab III berisi penjelasan mengenai: latar belakang berdirinya PRRI di Sumatra Barat, yang terdiri dari Situasi Pemerintahan Indonesia Pasca Kemerdekaan, Latar belakang berdirinya PRRI dan Berdirinya Dewan Banteng.

Bab IV berisi penjelasan tentang: kiprah Ahmad Husein dalam peristiwa PRRI 1958-1961 yang terdiri dari: Mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, Mencetuskan Ultimatum dan Tuntutan PRRI kepada Pemerintah Indonesia dan Melakukan upaya penyelesaian pemberontakan PRRI.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya yang pada intinya merupakan jawaban-jawaban dari permasalahan yang diajukan dan saran-saran.